

Catatan Kebijakan:

Pengungkapan lingkungan di Asia Tenggara: lanskap peraturan dan tren regional untuk persyaratan terkait air

Mei 2024



Pengungkapan lingkungan di Asia Tenggara: lanskap peraturan dan tren regional untuk persyaratan terkait air

Desakan untuk mewajibkan pengungkapan lingkungan terus meningkat pesat secara global, didukung dengan meningkatnya ketersediaan panduan dan standar-standar internasional yang kuat (*robust*).

Sepuluh prinsip CDP untuk pengungkapan wajib berkualitas tinggi/ *High Quality Mandatory Disclosure (HQMD)* dipublikasikan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan dalam menciptakan peraturan pengungkapan yang efektif dan menyeluruh. Sepuluh prinsip ini terdiri dari:

- 1) Menangani risiko dan peluang, ketergantungan dan dampak terhadap manusia dan planet.
- 2) Memastikan konsistensi dan interoperabilitas dari pengungkapan lintas yurisdiksi dan membangun dasar (*baseline*) global untuk standar-standar pengungkapan.
- 3) Memastikan konsistensi kebijakan dalam persyaratan pengungkapan lintas kebijakan dalam satu yurisdiksi.
- 4) Berbasis sains.
- 5) Merangkul seluruh institusi bisnis dan keuangan.
- 6) Memasukkan ekspektasi untuk pengungkapan rencana-rencana transisi iklim, air dan alam.
- 7) Memastikan kualitas dan reliabilitas serta pengaturan ekpektasi sebagai jaminan eksternal.
- 8) Menyiapkan mekanisme pelaksanaan.
- 9) Memperkuat peran badan-badan tata kelola perusahaan.
- 10) Menciptakan lingkungan untuk inovasi dan kemajuan pengungkapan¹.

Pada Konferensi PBB tahun 2023, Global Commission of the Economics of Water mengeluarkan tujuh rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ke-empat menekankan perlunya pengungkapan untuk mengarahkan pilihan (preferensi) pemodal dan konsumen ke arah praktik-praktik berkelanjutan.

Meskipun tren global ini positif, CDP data menunjukkan adanya respons yang berbeda-beda dari pemerintah nasional di seluruh dunia.

¹ Untuk gambaran yang lebih lengkap tentang sepuluh prinsip CDP, silakan merujuk pada: <https://www.cdp.net/en/policy/program-areas/mandatory-environmental-disclosure>.

Pengungkapan di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara adalah rumah bagi lebih dari 675 juta populasi² dan mendorong salah satu Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di dunia. Berada pada situasi ekonomi yang pesat dan posisi unik di rantai pasok dunia, keberagaman dan lanskap peraturan yang kian berkembang (lihat contoh integrasi terbaru sektor air Indonesia³ ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang-nya) layak untuk dicermati.

Ringkasan kebijakan ini memberikan sebuah gambaran singkat mengenai keadaan dan perkembangan pengungkapan lingkungan di kawasan tersebut, dengan fokus utama pada persyaratan pengungkapan terkait air. Tujuannya untuk menunjukkan lanskap peraturan yang ada saat ini dan mengidentifikasi tren regional, serta celah (*gap*) pada mandat-mandat pengungkapan. Fokusnya terbatas hanya pada pasar-pasar berikut: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Tren umum pada pengungkapan terkait iklim: menumbuhkan kesadaran dan ambisi

Sejalan dengan tren global, kawasan ini mengalami perubahan yang kentara menuju pengungkapan perusahaan yang lebih kuat terkait iklim. Singapura, misalnya, mulai mengadopsi TFCD, persyaratan pengungkapan wajib terkait iklim di tahun 2016⁴. Sementara, Filipina saat ini tengah mengembangkan panduan-panduan komprehensif untuk perusahaan-perusahaan tercatat,⁵ dengan upaya-upaya nyata menuju integrasi kerangka kerja pelaporan global seperti IFRS S2⁶.

Meskipun begitu, adopsi persyaratan pelaporan untuk institusi-institusi keuangan masih terbatas. Hanya Indonesia dan Singapura yang memiliki pengungkapan lingkungan wajib untuk institusi-institusi keuangan.

Tabel 1
Pemangku kepentingan yang ditargetkan berdasarkan negara

	Institusi Keuangan	Bisnis-bisnis yang tercatat	Bisnis besar tidak tercatat	Usaha Kecil Menengah (UKM)
Indonesia				
Malaysia				
Filipina				
Singapura				
Thailand				
Vietnam				

Catatan: Untuk pengungkapan lingkungan secara umum, tidak hanya terbatas pada air

 Peraturan wajib yang telah diterapkan⁷  Peraturan yang diajukan

2 Sumber: IMF Data Mapper®

3 Contoh pengintegrasian sektor air kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

4 Lihat lebih detail tentang Singapura di Sustainability Reporting - Singapore Exchange (SGX)

5 Lihat lebih detail tentang Filipina di: Sustainability Report - Securities and Exchange Commission

6 IFRS - IFRS S2 Climate-related Disclosures

7 Sumber: Laporan CDP 2023 Shaping High-Quality Mandatory Disclosure: Taking stock and emerging best practice

Pengungkapan lingkungan di Asia Tenggara: lanskap peraturan dan tren regional untuk persyaratan terkait air

Pengungkapan terkait air: masih di tahap awal

Secara global, pengungkapan terkait air mendapat manfaat dari meningkatnya ketersediaan panduan-panduan untuk perusahaan dan institusi keuangan, dan CDP telah menjadi pelopor dalam mendorong standar-standar yang lebih tinggi dan kerangka kerja pengungkapan air bermutu tinggi untuk perusahaan di seluruh dunia, seperti digambarkan di bawah⁸.

Gambar 1
Pandangan CDP mengenai kerangka kerja pengungkapan air bermutu tinggi yang komprehensif untuk perusahaan

Tata Kelola	Strategi	Manajemen Risiko	Metrik dan Target
			
Mengungkap tata kelola organisasi seputar risiko, peluang dan dampak terkait air	Mengungkap dampak aktual dan potensi dampak dari risiko serta peluang terkait air pada bisnis, strategi dan rencana keuangan organisasi	Mengungkap bagaimana organisasi mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko-risiko terkait air	Mengungkap metrik dan target yang digunakan untuk menilai dan mengelola risiko serta peluang terkait air yang relevan

Tata Kelola	Dampak Bisnis	Prosedur	Akuntansi Global dan Fasilitas Air
Mengumpulkan data mengenai apakah dan bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan digunakan untuk mengelola risiko, peluang dan dampak terkait air	Mengumpulkan data mengenai apakah perusahaan telah terdampak oleh isu-isu terkait air atau tidak	Mengumpulkan data terkait prosedur yang telah diterapkan perusahaan untuk menilai risiko-risiko terkait air	Mengumpulkan data terkait usaha dan tingkat fasilitas dari konsumsi, penarikan dan pembuangan air

Strategi Bisnis	Asesmen skenario	Nilai pada risiko
Mengumpulkan data mengenai apakah dan bagaimana sebuah perusahaan mengadaptasi rencana strategi dan finansial jangka pendek, menengah atau panjang untuk mengatasi risiko, peluang dan dampak terkait air	Mengumpulkan data mengenai apakah sebuah perusahaan menggunakan analisis skenario atau tidak dalam mempertimbangkan kemungkinan masa depan yang berbeda untuk air	Mengumpulkan data terkait jumlah aset di lokasi-lokasi kekurangan air dan nilai keuangan dari aset-aset tersebut

Risiko & peluang	Targets
Mengumpulkan data mengenai paparan yang substantif terhadap risiko dan peluang terkait air	Mengumpulkan data terkait target dan sasaran untuk air, termasuk kemajuan yang dilakukan terhadap target dan sasaran tersebut

Sumber: [Setting the high-water mark for mandatory disclosure, 2022 CDP Report](#).

⁸ Sumber: [Setting the high-water mark for mandatory disclosure, 2022 CDP Report](#).

Tabel 2
Pengungkapan Air CDP di Asia Tenggara

	Jumlah pengungkapan pada kuesioner ketahanan air CDP di tahun 2023	Tingkat respons (perusahaan yang mengungkapkan/ diminta)	Peningkatan di jumlah pengungkapan dari 2022 ke 2023 (%)
Indonesia	46	38%	+31%
Malaysia	45	27%	+18%
Filipina	33	26%	+32%
Singapura	18	14%	+20%
Thailand	12	36%	+33%
Vietnam	2	11%	0%

Sumber: Data pengungkapan CDP, Kuesioner Ketahanan Air (Water Security), 2022 dan 2023

Asia Tenggara juga telah mengambil langkah-langkah awal terhadap penerapan persyaratan pengungkapan terkait air. Upaya-upaya tersebut masih di tahap permulaan dan peraturan yang ada masih belum menyeluruh dan lengkap.

Perusahaan-perusahaan di kawasan Asia Tenggara telah meningkatkan langkah-langkah nyata dengan melibatkan sistem-sistem pelaporan sukarela, seperti yang dipaparkan pada data CDP tahun 2023 dan 2022 mengenai pengungkapan air pada kawasan ini. Namun, terdapat ruang yang signifikan untuk peningkatan.

Di negara-negara di mana terdapat kewajiban persyaratan pengungkapan air, peraturan-peraturan yang ada mengikutsertakan metrik menyeluruh berkaitan dengan penggunaan air dan polusi, ke dalam operasional langsung perusahaan. Mereka terbatas pada lingkup:

- **Ketiadaan persyaratan pengungkapan tata kelola spesifik untuk air**, yang amat penting untuk memahami bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengelola risiko-risiko dan peluang-peluang terkait air.
- **Persyaratan terbatas untuk pengungkapan keuangan mengenai risiko-risiko terkait air.** Perusahaan-perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan metrik kuantitatif, seperti potensi nilai pada risiko keuangan, penting untuk mengangkat nilai keuangan terhadap risiko-risiko dan peluang-peluang terkait dengan air.
- **Keterlibatan (Engagement) rantai nilai yang terbatas dalam pelaporan air.** Di beberapa kasus, seperti Filipina dan Singapura, terdapat keterlibatan rantai nilai. Filipina tengah mengembangkan peraturan-peraturan yang mewajibkan pengungkapan terkait dengan dampak-dampak pada rantai nilai hulu dan hilir⁹. Panduan pelaporan berkelanjutan Bursa Efek Singapura (SGX)¹⁰ menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tercatat melibatkan rantai nilai mereka dalam pelaporan, memperlihatkan cakupan yang lebih luas daripada operasi internal. Namun, hal ini tidak wajib maupun spesifik tentang air.

9 Source: 2019 SEC Memorandum Circular No. 4 - Sustainability Reporting Guidelines for Listed Companies (revised draft version).

10 Lihat: Sustainability Reporting - Singapore Exchange (SGX)

Pengungkapan lingkungan di Asia Tenggara: lanskap peraturan dan tren regional untuk persyaratan terkait air

Tabel 3
Metrik terkait air berdasarkan negara

Metrics	Indonesia	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam
Akuntansi Air						
Jumlah konsumsi atau penggunaan air	▼	▼		▼	▼	▼*
Intensitas air	▼		▼	▼	▼	
Jumlah pembuangan limbah (efluen)	▼	▼*			▼	▼
Jumlah air yang dimanfaatkan kembali atau didaur ulang			▼			▼*
Mekanisme pengelolaan limbah (efluen) mekanisme	▼				▼	
Penilaian risiko dan peluang						
Dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan, termasuk air	▼					
Tata Kelola						
Dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan, termasuk air		▼			▼	
Target						
Konsumsi/ penggunaan air	▼	▼			▼	
Pengurangan pembuangan limbah (efluen)		▼				
Penggunaan sumber-sumber air terbarukan	▼					

▼ Metrik wajib ▼ Metrik sukarela

*Hanya wajib untuk beberapa sektor (lihat [di sini](#))

Peraturan nasional yang relevan dan digunakan untuk tabel di bawah ini dapat dilihat di [Lampiran](#)

Penilaian materialitas lingkungan yang lebih komprehensif dapat mendukung pengembangan pengungkapan air bermutu tinggi

Panduan-panduan yang ada saat ini di Asia Tenggara merekomendasikan atau memandatkan sebuah set metrik air yang terbatas (lihat tabel 3 di atas). Lebih lanjut, kesenjangan pada panduan-panduan tersebut di beberapa negara adalah kurangnya persyaratan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengungkap proses mereka dalam mengidentifikasi apa itu material (lihat tabel 4 di bawah). Sebaliknya, di beberapa kasus (misalnya, di Singapura), tidak ada kebutuhan pelaporan terkait air kecuali dianggap material oleh perusahaan-perusahaan.

Kelengkapan asesmen materialitas dapat secara signifikan berdampak pada kedalaman dan luasnya cakupan pelaporan terkait air. Perusahaan-perusahaan yang mengidentifikasi risiko-risiko atau peluang-peluang material mengenai air, cenderung melaporkan lebih banyak daripada metrik minimum akuntansi air. Misalnya, data global CDP tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengintegrasikan air ke dalam strategi bisnis jangka panjang mereka, mewujudkan peluang-peluang terkait air hingga empat kali lipat¹¹. Selain itu, data global CDP tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengintegrasikan pemasok (*suppliers*) ke dalam asesmen risiko cenderung melaporkan risiko rantai pasok hingga tujuh kali lipat¹².

Panduan-panduan dan persyaratan untuk asesmen materialitas, jika ada, cenderung bersifat terbuka (*open-ended*). Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan terhadap pengembangan pelaporan yang lebih kuat di kawasan Asia Tenggara.

Seiring kemajuan dan semakin menguatnya peraturan-peraturan dan panduan-panduan seputar penilaian materialitas, kita dapat mengantisipasi bahwa pengungkapan terkait air akan menjadi lebih komprehensif dan meluas.

Tabel 4
Penilaian Materialitas di Asia Tenggara

	Pendekatan Materialitas	Penilaian Materialitas
Indonesia	Tidak ditentukan*	Tidak ditentukan*
Malaysia	Materialitas ganda	Butuh diungkapkan bagaimana mereka diidentifikasi
Filipina	Materialitas keuangan	Daftar hal-hal material yang ditentukan
Singapura	Materialitas keuangan; "Panduan Kerja" mengenai materialitas	Butuh diungkapkan bagaimana mereka diidentifikasi
Thailand	Materialitas keuangan	Direkomendasikan untuk melaporkan proses asesmen materialitas
Vietnam	Materialitas ganda	Tidak ditentukan

Peraturan wajib yang diterapkan Peraturan yang diajukan Panduan-panduan

Catatan: Untuk pengungkapan lingkungan secara umum, tidak hanya untuk air
*Materialitas ganda tersirat dalam Panduan Investasi Berkelanjutan

11 Sumber: CDP Global Water Report 2022, *Riding the Wave: How the private sector is seizing opportunities to accelerate progress on water security*.
12 Sumber: CDP Report, *Stewardship at the source: Global Water Report 2023*.

Pengungkapan lingkungan di Asia Tenggara: lanskap peraturan dan tren regional untuk persyaratan terkait air

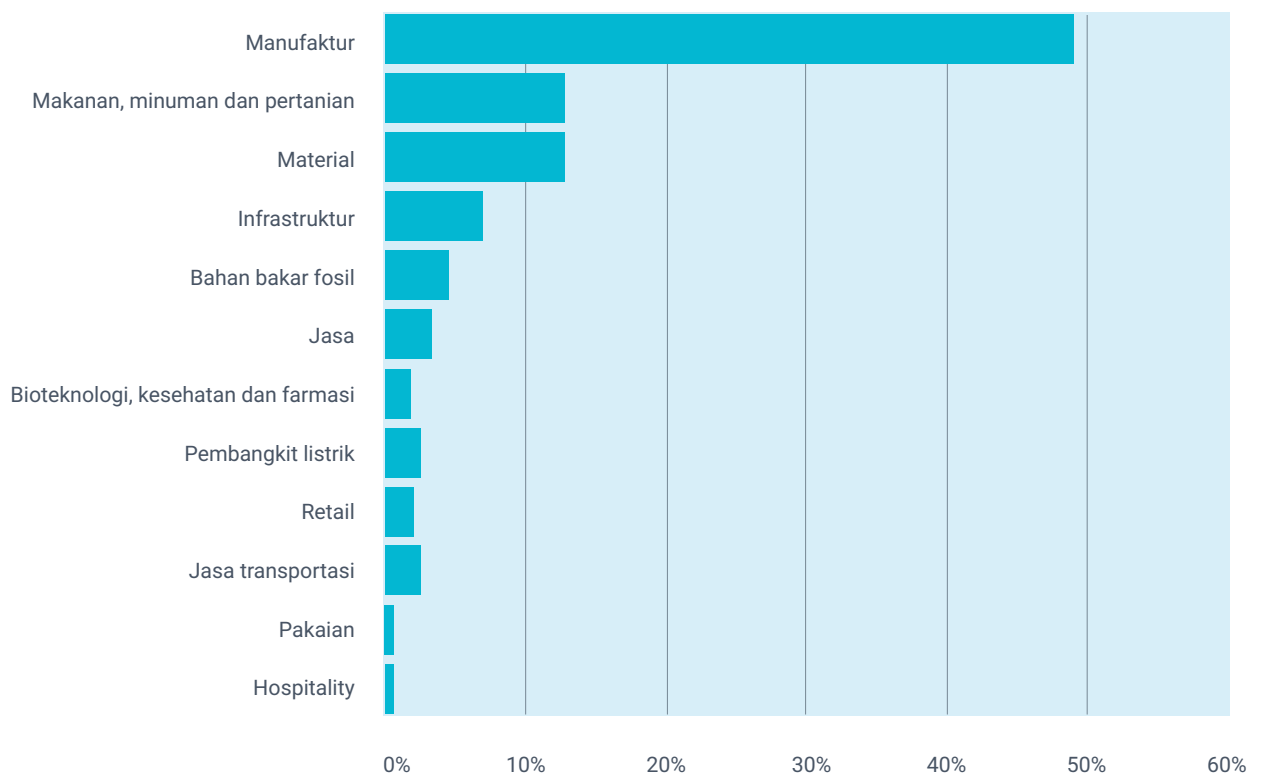
Data spesifik sektor air dapat membantu menjembatani kesenjangan peraturan

Di luar persyaratan lengkap data terkait air yang harus diterapkan di semua perusahaan, lebih banyak data spesifik di sektor ini untuk aktivitas bisnis berdampak tinggi juga dibutuhkan.

Sesuai dengan apa yang dinyatakan pada data CDP untuk kawasan (berdasarkan 156 sampel pengungkapan) di bawah ini, selain sektor manufaktur, dibutuhkan lebih banyak data dari masing-masing industri untuk memahami 'penyerapan' terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Gambar 2 Pengungkapan Air per sektor di Asia Tenggara, CDP 2023

Persentase responden terhadap Kuesioner Ketahanan Air CDP per sektor di Asia Tenggara



Sumber: CDP 2023 Data, Water Security Questionnaire

Beberapa negara Asia Tenggara telah mulai memperkenalkan peraturan-peraturan ke arah ini. Malaysia mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di konstruksi, produk dan jasa konsumen, energi, kesehatan, produk dan jasa industrial, perkebunan, properti, transportasi dan logistik dan utilitas untuk melaporkan volume total air limbah (efluen) yang dilepaskan. Di Vietnam, perusahaan-perusahaan tercatat harus melaporkan metrik pasokan air dan jumlah air yang digunakan serta air yang didaur ulang¹³.

Menggunakan sebuah pendekatan spesifik sektor untuk mendorong persyaratan pelaporan wajib yang lebih tinggi dapat dijadikan langkah awal untuk adopsi persyaratan pengungkapan seluruh sektor swasta yang sukses dan lebih kuat di masa mendatang. Hal ini telah terbukti efektif untuk pengungkapan iklim: Singapura pertama kali memperkenalkan pengungkapan wajib TCFD untuk perusahaan-perusahaan tercatat di beberapa sektor saja.

Seiring dengan semakin berkembangnya penilaian materialitas di kawasan Asia Tenggara, sebuah pendekatan spesifik sektor yang ditargetkan untuk pengungkapan terkait air sementara ini dapat terbukti instrumental dalam menjembatani kesenjangan peraturan.

Kesimpulan

Pengungkapan data air oleh perusahaan penting untuk mengatasi krisis air. Mengukur dan mengungkapkan ketergantungan, dampak, risiko dan peluang (DIRO) membuat perusahaan-perusahaan lebih berketahanan air. Analisis ini telah menunjukkan bahwa dalam bentuknya saat ini, ketentuan-ketentuan pelaporan air di kawasan tersebut tidak cukup dan akan menjadi penghambat, bahkan tidak memungkinkan bagi para investor untuk menghitung 'biaya' dampak dan risiko air; dan belum sepadan dengan tantangan air di global dan nasional. Lebih lanjut, upaya-upaya sukarela tidak cukup besar urgensi dan cakupannya dibandingkan krisis air yang tengah berlangsung dan peraturan-peraturan semakin dibutuhkan daripada sebelumnya.

CDP mendesak para pembuat kebijakan dan pasar keuangan di kawasan Asia Tenggara untuk memasukkan prinsip-prinsip pengungkapan wajib berkualitas tinggi atau *High-Quality Mandatory Disclosure (HQMD)* ke dalam kebijakan dan peraturan.

Lampiran

Daftar peraturan-peraturan yang relevan

	Peraturan/ Panduan	Penyesuaian Terakhir	Persyaratan Pengungkapan	Supervisi & Penegakan	Status	Target Pemangku Kepentingan	Pendekatan
Indonesia ¹⁴	Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017	2021	Wajib	Indonesian Financial Services Authority - OJK	Diterapkan	Perusahaan	Tidak ditentukan
	Peraturan KLHK 01/2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	2021	Sukarela	Ministry of Environment and Forestry (MoEF)	Diterapkan	Perusahaan	Tidak ditentukan
	Sistem Registri Nasional (SRN)	2021	Wajib	MoEF	Diterapkan	Seluruh entitas bisnis	Tidak ditentukan
	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Wajib	Ministry of Industry	Diterapkan	Perusahaan industrial	Tidak ditentukan
	Panduan Investasi Lestari	Nov 2022	Sukarela	Investment Ministry	Diterapkan	Perusahaan, pemodal	Tidak ditentukan (Materialitas Ganda tersirat)
Malaysia	Bursa Malaysia Listing Requirements	Sept 2022	Wajib	Bursa Malaysia	Diterapkan	Perusahaan Tercatat (PLC)	Materialitas Ganda
	Simplified ESG Disclosure Guide (SEDG)	Oct 2023	Sukarela	Capital Markets Malaysia (CMM) *CMM is an affiliate of Security Commissions Malaysia	Diterapkan	Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Tidak ditentukan
Filipina	2019 SEC Memorandum Circular No. 4 - Sustainability Reporting Guidelines for Listed Companies	2019	Wajib	Securities and Exchange Commission (SEC) Philippines	Diterapkan	Perusahaan Tercatat (PLC)	Materialitas Ganda
	[Draft] Memorandum Circular on the Revised Guidelines for PLCs	Okt 2023	Wajib		Masih dikembangkan		Materialitas Keuangan
Singapura	SGX Sustainability Reporting Guide	Jan 2022	Wajib	Singapore Exchange (SGX)	Diterapkan	Perusahaan Tercatat (PLC)	Materialitas Keuangan
	Guidelines on Environmental Risk Management for Banks, Asset Managers and Insurers (ERM Guidelines)	Des 2020	Wajib	Monetary Authority of Singapore (MAS)	Diterapkan	Institusi Keuangan, Manajer Aset dan Insurer	Materialitas Keuangan

	Peraturan/ Panduan	Penyesuaian Terakhir	Persyaratan Pengungkapan	Supervisi & Penegakan	Status	Target Pemangku Kepentingan	Pendekatan
Thailand	<u>Regulations on the preparation of the annual registration statement</u>	Sep 2020	Wajib	Securities and Exchange Commission (SEC) of Thailand	Diterapkan	Perusahaan Tercatat (PLC)	Materialitas Keuangan
	<u>Sustainability Reporting Guide</u>	Mei 2022	Sukarela	Stock Exchange Thailand (SET)	Diterapkan		Materialitas Keuangan
	<u>Guidelines on Management and Disclosure of Climate-related Risk by Asset Managers</u>	Jan 2023	Sukarela	Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand	Diterapkan	Perusahaan Manajemen Aset (AMCs)	Materialitas Keuangan
	<u>BOT policy statement</u>	Feb 2023	Sukarela	BOT	Diterapkan	Institusi Keuangan dan perusahaan di dalam grup bisnis keuangan	Tidak ditentukan
Vietnam	<u>Circular No. 96/2020/TT-BTC</u>	Nov 2020	Wajib	SSC Vietnam	Diterapkan	Perusahaan Tercatat (PLC)	Materialitas Ganda
	<u>Corporate Governance Code of Best Practices</u>	2019	Sukarela	SSC Vietnam	Diterapkan	Semua perusahaan	Tidak ditentukan

Penulis

Jaime Han
Angèle Cauchois

Ucapan Terima Kasih

Patricia Calderon
Pietro Bertazzi
Helen Finlay
Renata de Souza Leão
Bianca Barilla
Erica de Souza
Nur Arifiandi
Adam Wentworth

Kontak media

Adam Wentworth
adam.wentworth@cdp.net



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC**

Catatan:

Laporan ini disusun dibawah kontrak Global
Program, Water Division of SDC-the Swiss
Agency of Development and Cooperation. CDP
bertanggungjawab terhadap konten yang ada.